

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul :

**STRATEGI KEAMANAN SWEDIA TERHADAP RUSSIA DIKAWASAN LAUT
BALTIK 2013-2017**

*(Sweden's Security Strategy Against Russia in The Baltic Sea Region
2013-2017)*



Alvin Hervian Putra

2014 0510 126

**STRATEGI KEAMANAN SWEDIA TERHADAP RUSSIA DIKAWASAN LAUT
BALTIK 2013-2017**

Alvin Hervian Putra

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Alvin.hervian.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This research is aimed to finding out about Sweden's security strategy against Russia in the Baltic Sea Region 2013-2017. The author will also discusses how the dynamics of Swedish foreign policy are beginning to change from non-alignment neutrality to neutrality with alignment from the end of the Cold War until 2017. Besides, the author will discusses how threats from Russia make Sweden carry out various military and foreign policy reforms. And also author will also discusses about how Sweden applies a security strategy to withstand threats from Russia. The method used in this research is qualitative by using secondary data. In this study the author uses 2 theory that is the theory of deterrence and theory of alliance. Deterrence theory is used there will be a risk if Russia attacks. While alliance theory is used to find out how Sweden cooperates with other countries to withstand threats from Russia.

Keyword: *Changes in Swedish Foreign Policy, Russia Threats to Sweden, Sweden Security Strategy*

A. PENDAHULUAN

Situasi keamanan dikawasan laut Baltik¹ telah menurun pada dekade terakhir ini. Hal ini mengakibatkan ancaman dari negara negara lain meningkat dan membutuhkan perhatian yang khusus. Seperti Russia mulai melakukan berbagai provokasi beberapa negara kawasan Baltik, seperti melakukan pelanggaran wilayah udara maupun laut. Salah satu yang menjadi korban dari tindakan Rusia adalah Swedia. Negara yang memiliki luas 447,435 km², dan sekitar 3,200 km² wilayah pesisirnya di laut Baltik, serta memiliki wilayah tepat dipertengahan laut baltik serta memiliki kepulauan di pertengahan laut baltik dimana berada di tepat di kawasan jalur lalu lintas laut maupun udara negara negara Baltik, yang bernama Gotland, yang membuat Swedia menjadi rentan terhadap ancaman negara asing.

Pada 16 Oktober 2014, intelejen Swedia menangkap komunikasi melalui radio darurat yang berisi pembicaraan dalam bahasa Russia dikawasan laut teritori Swedia antara awak kapal selam dan armada militer di wilayah Kaliningrad. Selanjutnya, satu hari setelahnya, masyarakat pesisir Stockholm melaporkan kepada angkatan bersenjata Swedia, bahwa mereka melihat benda yang terlihat seperti kapal selam. Berdasarkan laporan tersebut, kapal-kapal pemburu kapal selam dan peralatan penunjang disiagakan dan melakukan perburuan di wilayah kepulauan Stockholm, dimana merupakan posisi terakhir dari kapal selam setelah pihak intelejen Swedia berhasil melakukan enkripsi komunikasi radio darurat Russia yang menunjukkan posisi terakhir kapal selam tersebut. Melihat hal itu, media lokal Swedia dan media internasional mulai berasumsi bahwa kapal selam yang dicari merupakan kapal selam Russia.

Berdasarkan kejadian tersebut pemerintah Russia menyangkal tudingan bahwa kapal selam mereka melakukan operasi di wilayah Swedia sebaliknya Russia mengatakan bahwa kapal selam tersebut merupakan kapal selam milik Belanda yang melakukan latihan militer bersama Swedia. Selanjutnya, tuduhan ini disangkal oleh pemerintah Belanda melalui juru bicara menteri pertahanan, Marnoes Visser, yang mengatakan bahwa kapal selam Belanda, Bruinvis, telah berada di perairan Estonia dan menuju pelabuhan di Tallinn. Selain itu, latihan militer bersama

¹ Negara negara Baltik adalah kumpulan negara dikawasan eropa utara meliputi Denmark, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Jerman, Norwegia, Russia dan Swedia

yang dilakukan Swedia dan Belanda telah berakhir satu minggu sebelum peristiwa itu terjadi, serta ia menegaskan bahwa pemerintah Belanda tidak ikut campur dalam masalah ini.²

Ketika pihak militer Swedia mulai menghentikan pencarian kapal selam tersebut, dikarenakan tidak mendapatkan kapal selam yang dicari, media mulai menunjukkan bahwa kemampuan militer Swedia berkurang drastis. Berbeda ketika pencarian kapal selam pada 1981, dimana militer Swedia berhasil melakukan penyisiran terhadap penyusupan kapal selam Uni Soviet, U-137, bersama dengan awak kapal tersebut. Operasi penyisiran berhasil dilakukan dan menemukan kapal selam Uni Soviet karena terdampar dikawasan laut dangkal di Gåsefjärden yang memicu kerenggangan hubungan diantara dua negara pada masa itu.³

Sebelumnya pada 2013, terjadi provokasi yang dilakukan militer Russia kepada Swedia, dimana 6 pesawat tempur Russia yang terdiri dari dua bomber nuklir dan empat pesawat tempur pendamping melakukan latihan militer di perbatasan Swedia menuju sisi timur kepulauan di dekat Stockholm, dan terbang melewati Gotska Sandön, kepulauan tak berpenghuni milik Swedia di laut baltik. Walaupun demikian tidak ada pesawat tempur Swedia yang merespon atas provokasi tersebut, karena kurangnya komunikasi serta tidak adanya pasukan cepat tanggap Swedia untuk melakukan pencegahan secara langsung. Tetapi pesawat tempur NATO⁴ dari Lithuania dan Denmark merespon cepat atas insiden tersebut, dengan membayangi pesawat pesawat tempur Russia sampai dengan tujuan akhirnya di Kaliningrad.⁵

Dari insiden penyusupan pesawat tempur Russia di wilayah Swedia, laporan pada 2016, NATO menunjukkan bahwa Russia melakukan latihan serangan nuklir kepada Swedia, dengan

²Russia's Provocations in the Nordic-Baltic States: The U.S. Needs a Strategy to Support the Region. Dalam Heritage.org: <https://www.heritage.org/europe/report/russias-provocations-the-nordic-baltic-states-the-us-needs-strategy-support-the>, diakses pada 24 April 2018

³Gustafsson. *The Swedish Submarine Issue*. (Stockholm: The Royal Swedish Academy of War Science, 2010) hal.5

⁴ NATO adalah North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara

⁵*Russian jets practised attacks on Sweden*. dalam The local: <https://www.thelocal.se/20130422/47474>, diakses pada 3 Maret 2018

target adalah markas militer di selatan Swedia dan markas intelejen Swedia, diluar kota Stockholm.⁶

Russia melalui pernyataan Kepala Staff Umum Angkatan Bersenjata Russia, Nikolai Yegorovich Makarov, menyatakan bahwa kawasan laut Baltik merupakan kawasan tanggung jawab pemerintah Russia. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan jalur utama perdagangan dan ekspor minyak dan gas Russia, serta di kawasan tersebut terdapat markas angkatan laut Russia yang berada di Kalingningrad dan Sankt-Peterburg. Selain itu, terdapat etnis minoritas Russia yang berada di kawasan negara negara Baltik⁷.

Pada krisis ini, parlemen Swedia, *Riksdag*⁸, menegaskan bahwa peran Russia dalam menyelesaikan konflik tidak konstruktif sehingga pelanggaran kedaulatan dan ancaman ancaman yang dilakukan oleh Russia terhadap Swedia harus diantisipasi agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Hal ini membuat Swedia beralih fokus dari ancaman post-modern seperti terorisme dan perubahan iklim menuju keamanan nasional dan pertahanan nasional yang telah ditinggalkan semenjak perang dingin berakhir. Swedia yang tidak memiliki keanggotaan NATO⁹ menjadi lebih waspada. Ketika negara tersebut tidak bergabung dengan NATO, maka negara tersebut tidak termasuk dalam *Article 5*, mengenai konsep pertahanan kolektif, dimana aksi menyerang terhadap salah satu anggota, berarti menyerang terhadap semua anggota NATO itu sendiri.

Swedia sendiri telah mengurangi personil serta alat tempurnya semenjak perang dingin berakhir, pada akhir perang dingin, Swedia memiliki sekitar 100,000 personil aktif militer, serta pasukan pertahanan nasional dan *Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna*¹⁰, dengan tambahan pasukan sebesar 350,000 sebagai pasukan cadangan. Kekuatan angkatan udara Swedia memiliki

⁶NATO report: *A 2013 Russian aerial exercise was actually a 'simulated nuclear attack' on Sweden*. dalam businessinsider: <http://www.businessinsider.sg/nato-report-russia-sweden-nuclear-2016-2/?r=US&IR=T>, diakses pada 3 Maret 2018

⁷ Lundgren, Joel (2013) *The Nordics' fear of the Russian Bear*, Gothenburg: University of Gothenburg, hal. 1

⁸ Riksdag adalah pembuat keputusan tertinggi di Swedia, termasuk membuat hukum dan aturan serta menentukan budget pemerintahan, selain itu juga bertugas untuk mengevaluasi pemerintahan di Swedia

⁹ NATO adalah North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara

¹⁰*Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna* atau Pasukan pertahanan nasional adalah pasukan pertahanan wilayah nasional yang terdiri dari milisi tempur yang bertugas sebagai pasukan cadangan bagi unit militer profesional Swedia

lebih dari 300 pesawat udara, kekuatan angkatan laut Swedia memiliki 40 kapal perang dan 12 kapal selam serta pasukan artileri pertahanan pesisir yang berjumlah 28 batalion tempur.

Selain pengurangan, konsep pertahanan total dimana unsur pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada angkatan bersenjata saja tetapi juga meliputi unsur segala lapisan masyarakat, dihapuskan oleh Swedia. Hasil dari hal ini adalah angkatan bersenjata Swedia hanya terdiri dari¹¹.

1. 6 % dari unit tempur yang seharusnya dibandingkan dengan 1980 an
2. Tidak ada pertahanan lokal
3. 15 % atau sekitar 17,000 dari pasukan *Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna*
4. Hanya memiliki sekitar 100 pesawat tempur
5. Angkatan laut hanya memiliki 7 kapal tempur serta 4 kapal selam

Hal yang membuat Swedia menurunkan kapasitas militernya adalah karena berkurangnya ancaman dari negara lain, dalam kasus ini adalah Uni Soviet. Menghilangnya ancaman dari Soviet pada 1991, membuat Swedia beralih dari ancaman keamanan dan pertahanan nasional, menuju ancaman post-modern semacam perubahan iklim semenjak bergabungnya dengan Uni Eropa pada 1995 serta terorisme yang mulai muncul selepas serangan 11 September 2001.

Untuk membantu kawasan negara negara Baltik dalam melindungi daerah teritorialnya dari ancaman asing, Amerika Serikat melakukan perjanjian pertahanan dengan negara negara Baltik yang tidak bergabung dengan keanggotaan NATO, yaitu Finlandia dan Swedia, dengan melakukan kerjasama militer, pertukaran informasi dan intelejen, pengembangan dan pengadaan teknologi militer.

Penempatan dan penambahan infrastruktur maupun alat alat militer serta personilnya juga ditambahkan kedalam kawasan negara negara Baltik, untuk anggota NATO sendiri seperti, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia. Untuk meningkatkan pengaruh serta kapasitas militer Amerika Serikat beserta NATO, dikawasan negara negara Baltik, pasca memanasnya situasi di kawasan tersebut.

¹¹Sweden: *The Defense that Disappeared* Dalam [gatestoneinstitute.org](https://www.gatestoneinstitute.org):
<https://www.gatestoneinstitute.org/6287/sweden-military> diakses pada 10 mei 2018

Melalui kasus ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Swedia terhadap laut Baltik periode 2013 sampai 2017, yang akan memaparkan usaha Swedia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional nya dikawasan laut Baltik paska terjadinya berbagai provokasi yang dilakukan oleh militer Russia, hal ini menarik dikaji karena Swedia telah menjadi negara netral dan selamat melewati dua perang dunia hingga sekarang, dan telah menghindari konflik dengan negara negara tetangga selama lebih dari 200 tahun semenjak perang terakhir Swedia dengan Norwegia pada 1814.

B. PEMBAHASAN

Sebelum perang dingin berakhir Swedia mempertahankan prinsip “alliansfriheit i fred syftande till neutralitet i krieg” yang berarti bahwa tidak memihak pada masa damai dan tetap netral pada masa perang, walaupun demikian Swedia tetap menerapkan secara kuat serta melakukan pengembangan terhadap prinsip pertahanan wilayah dengan membangun kekuatan militer melalui wajib militer, pengembangan industri pertahanan.

1. Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia 1991-2000

Saat perang dingin berakhir, persepsi terhadap ancaman bukan lagi mengenai konflik militer antar negara, tetapi lebih kepada ketidakstabilan suatu negara yang mengakibatkan munculnya konflik didalam negara itu. Selain itu muncul isu isu baru antar negara seperti pencemaran lingkungan, organisasi kriminal dan terorisme yang membuat agenda politik internasional tidak lagi mengutamakan isu militer antar negara seperti pada saat perang dingin berlangsung. Swedia menerapkan konsep ini, karena selepas runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin, membuat Swedia tidak memiliki peran khusus lagi sebagai negara netral yang berperan sebagai mediator maupun menjadi jembatan antara blok barat dan blok timur untuk melakukan dialog tertentu.¹²

Pada 1993, deklarasi kerjasama di tanda tangani antara Perdana Menteri Carl Bildt dan Presiden Russia Boris Yeltsin, yang berisi mengenai kerjasama dan ikatan hubungan erat termasuk dalam hal politik dan ekonomi melalui perdagangan antar Negara. Perdana Menteri Carl Bildt, menegaskan bahwa melalui perjanjian kerjasama antar kedua Negara, diharapkan

¹² K. Lidqvist (2016) *Cool Neighbours: How has Sweden's attitude towards Russia changed since the end of the Cold War*. Trollhattan:University of West, 22.

mampu menjadi pondasi untuk menuju ikatan lebih erat dalam hubungan antar Negara dengan negara demokrasi baru, Russia. Dengan membantu Russia dan Negara negara bekas anggota Uni Soviet menjadi Negara yang demokratis, diharapkan mampu mengurangi ancaman keamanan bagi Eropa dan khususnya bagi Swedia itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kebijakan keamaan Swedia berubah dari awalnya mengenai keamanan dan pertahanan nasional, menjadi kebijakan yang lebih damai dan dalam hal pengurangan senjata dikawasan Eropa.

Swedia menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 1995. Walaupun demikian Swedia tetap mempertahankan netralitas dimana pertahanan militer hanya dikembangkan dan di terapkan terhadap dalam menjaga kedamaian dan dalam operasi kemanusiaan saja. Swedia mendapatkan peningkatan dalam aspek politik, ekonomi dan keamanan. Melalui *Common Foreign and Security Policy* (CFSP), prioritas Swedia adalah untuk meningkatkan pengaruh kebijakan keamanan dan pertahanan didalam kawasan Eropa, yang dianut dan diprioritaskan oleh negara netral lain setelah bergabung dengan Uni Eropa. Dengan intergrasinya Swedia kedalam Uni Eropa, secara otomatis membuat Swedia memiliki hubungan yang dekat dengan NATO melalui program *Partnership for Peace* (PfP), walaupun secara resmi Swedia berada diluar aliansi tersebut, sejalur dengan kebijakan mengenai ketidak berpihakan serta netralitas Swedia didalam dunia internasional.¹³

Swedia mulai secara aktif ikut dalam kerjasama keamanan internasional dengan Amerika Serikat dan NATO, dan secara terbuka melakukan kerjasama keamanan dengan Uni Eropa sejauh tidak menyangkut pautkan dengan keamanan pertahanan wilayah antar negara. Partisipasi Swedia dalam hal keamanan seperti ikut dalam pasukan penjaga perdamaian (*United Nations Protection Force*) UNPROFOR di Bosnia pada 1993, ikut dalam NATO *Partnership for Peace* pada 1994, sebagai anggota observasi didalam *West European Union* (WEU) pada 1995, berpartisipasi dalam pasukan multinasional dibawah komando NATO dalam *Implementation Force* (IFOR) pada 1995, yang berganti menjadi *Stabilisation Force* (SFOR) untuk mengawasi perjanjian damai di Bosnia pada 1997, menjadi salah satu anggota dalam *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) dan bergabung dengan *West European Armaments Group* (WEAG)

¹³ *Ibid* hal. 26

pada 1997, untuk bertujuan bekerja sama dalam melakukan penelitian di bidang pertahanan dan menciptakan pasar bahan baku pertahanan di kawasan Eropa.¹⁴

Kebijakan netral menjadikan dilemma bagi Swedia, terlebih ketika terjadinya konflik Kosovo pada 1998, ketika terjadinya perang sipil dan konflik yang melibatkan perang etnis tertentu yang mengakibatkan geonosida bagi etnis minoritas, yang tentunya menjadikan krisis kemanusiaan di akhir abad ke 20. Swedia adalah salah satu dari sedikit negara dimana memiliki landasan kuat mengenai konsep penerapan hak asasi manusia bagi masyarakat internasional, melalui menteri luar negeri Swedia pada saat itu, Anna Lindh, mengatakan bahwa prinsip dasar Uni Eropa, yang memiliki kesamaan dengan Swedia adalah mengenai demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁵

Pada 1999, NATO melakukan intervensi terhadap konflik Kosovo, meskipun Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan mandat untuk melakukan intervensi terhadap konflik Kosovo. Berdasarkan kebijakan resmi Swedia, satu satunya cara yang dapat di setujui mengenai penggunaan kekuatan militer internasional adalah sebagai langkah pertahanan diri ataupun dilakukan melalui mandat Dewan Keamanan PBB. Konflik Kosovo pada 1999, membuat Swedia melakukan refleksi ulang mengenai penerapan kebijakan netral didalam dunia internasional dan untuk menghadapi ancaman global yang baru. Pengalaman penerapan kebijakan netral Swedia di Kosovo memperlihatkan adanya sisi negatif dari penerapan kebijakan netral di dalam politik global.¹⁶

Pada tahun 2000, ketika Vladimir Putin menjadi Presiden Russia, hubungan dengan negara negara Uni Eropa dan Swedia meningkat karena kebijakan politik luar negeri yang pro terhadap negara negara Uni Eropa, hal ini diakibatkan karena sebelumnya keadaan ekonomi dan politik Russia masih belum stabil. Swedia dan Uni Eropa menerapkan kebijakan untuk menguatkan hubungan antar negara dengan Russia, sebagai agenda utama pada dekade selanjutnya. Russia sangat disambut oleh negara negara barat pada saat itu, karena keinginannya untuk berpartisipasi terhadap berbagai organisasi antar negara seperti memiliki ambisi untuk bergabung dengan

¹⁴ Parker, Joshua. (2017) *The Neutral Ally: Sweden and the Social Construction of Security Identity*, Ottawa: University of Ottawa, 44

¹⁵ Basset, B. (2012), *Factors Influencing Sweden's Changing Stance on Neutrality*, Urbana: University of Illinois, 36

¹⁶ Parker, Joshua, *Op.cit*, hal. 44

World Trade Organisation (WTO), Swedia ikut membantu dalam hal ini, dengan menunjukkan bantuan melalui pengembangan politik dan ekonomi.¹⁷

Berbagai diskusi politik internal Swedia mulai bermunculan mengenai bagaimana caranya dalam konsep moral penerapan terhadap tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan campur tangan militer bahkan dalam ketiadaan mandat Dewan Keamanan PBB, dari kasus konflik Kosovo pada 1999 sebagai langkah kedepannya bagi Swedia. Hal ini membuat berubahnya pandangan Swedia dalam penerapan netralitas dan merubah peran bagaimana caranya terlibat dalam tanggung jawab untuk melindungi dari krisis kemanusiaan di masa yang akan datang.¹⁸

2. Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia 2000-2010

Pada Februari 2001, belajar dari pengalaman terhadap konflik Kosovo, membuat Swedia mulai menyoroti peran penting PBB, serta membuka diskusi ataupun debat didalam parlemen mengenai kebijakan keamanan Swedia, namun dalam meninggalkan konsep penerapan kebijakan tidak berpartisipasi dalam aliansi militer bukan tujuan utama pada saat itu. Menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Swedia terdiri dari tiga identitas, yaitu Nordik, Eropa dan Dunia, menambahkan juga bahwa kebijakan tidak berpartisipasi dalam aliansi militer adalah asset bagi Swedia dan didukung dengan kuat oleh masyarakatnya, hal ini membuat Swedia bebas dalam melakukan tindakan, sehingga dapat mengurangi resiko konflik dan ketegangan di kawasan Eropa, dengan demikian membuat Swedia bisa menjadi lebih aktif kedalam pelucutan senjata nuklir, semua faktor diatas merupakan basis dari kebijakan keamanan Swedia. Selain itu penerapan penguatan hubungan dengan Russia, dimana bantuan Swedia terhadap Russia meliputi bantuan politik dan Ekonomi sangat gencar dilakukan sebagai langkah upaya untuk membuat Russia menjadi salah satu negara demokrasi yang baru dan mengurangi ancaman di kawasan Eropa seperti pada saat jaman perang dingin berlangsung.¹⁹

Pada September 2001, persepsi dunia terhadap ancaman internasional tidak lagi datang dari negara maupun grup lokal yang terikat terhadap perselisihan mengenai akan suatu wilayah, tetapi

¹⁷ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 31

¹⁸ Basset, B, *Op.cit*, hal. 38

¹⁹ Basset, B, *Op.cit*, hal. 39

datang dari sel teroris yang dianggap lebih berbahaya terhadap masyarakat internasional, terlebih selepas serangan pada 11 September 2001. Aktor nonnegara menjadi salah satu ancaman utama setelah peristiwa 11 September, ketika teroris melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 5, dalam perjanjian NATO, dimana serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan terhadap semua negara anggota. Hal ini membuat seluruh anggota NATO melakukan operasi penumpasan sel teroris di Afghanistan.

Dibawah mandat dan pengawasan Dewan Keamanan PBB, Swedia menerjunkan militer tempurnya ke Afghanistan pada akhir 2001, sebagai langkah upaya untuk mendukung pasukan *International Security Assistance Force* (ISAF) dan pemerintah Afghanistan, untuk membantu dalam hal menumpas terorisme melalui misi diluar pertempuran seperti membantu dalam hal intelejen tempur, melakukan kooperasi militer dengan sipil, dan juga pembangunan bagi provinsi di wilayah operasi militer tempur. Hal ini membuat Swedia memiliki kemauan untuk memperluas pengaruh asset militer diluar wilayah Eropa.²⁰

Komitmen Swedia untuk menumpas terorisme menggambarkan berubahnya kebijakan luar negeri mengenai keamanan dan pertahanan yang sebelumnya adalah tidak berpartisipasi dalam aliansi militer manapun. Meskipun Swedia mengatakan bahwa netralitas merupakan tujuan utamanya terhadap setiap konflik di lingkup internasional, tetapi para pembuat kebijakan Swedia mulai menyadari bahwa keamanan Swedia lebih terjamin dengan Uni Eropa.²¹

Semenjak 2003, konsep netralitas Swedia, tidak lagi seperti ketika awal perang dingin dimana ketidakberpihakan merupakan tujuan utama, berbagai kerjasama internasional telah banyak dilakukan oleh Swedia, walaupun demikian, Swedia masih secara resmi adalah negara netral. Ketika terjadinya pemilihan umum pada 2006, dan Frederic Reinfeldt menduduki posisi sebagai Perdana Menteri dan Carl Bildt dimana dulunya adalah Perdana Menteri Swedia periode 1991-1994, menduduki posisi menjadi menteri luar negeri, konsep netralitas Swedia perlahan berubah. Carl Bildt menyatakan bahwa kebijakan netral Swedia tetap pada ikatan netralitas pada masa lalu, tetapi menyarankan bahwa Swedia kedepannya harus lebih menempatkan

²⁰ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) dalam https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm diakses pada 08 Agustus 2018

²¹ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 41

kebijakannya lebih kedalam integrasi dengan Uni Eropa dan tidak lagi memusatkan netralitas sebagai prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Swedia.

Perang Georgia dimulai pada 2008 yang disebabkan oleh separatistis yang menginginkan kemerdekaan untuk wilayah Ossetia selatan dan Abkhaz. Perang dimulai pada 8 Agustus 2008, dan berlangsung selama 5 hari, antara unit militer Georgia dan Ossetia selatan serta Abkhaz. Seperti yang terjadi di Chechnya dimana pasukan separatistis mendapatkan bantuan dari militer Russia. Perang ini mendapatkan kritik dari internasional dimana setelah 5 hari pertempuran, dengan banyak korban jiwa. Setelah 5 hari pertempuran, gencatan senjata dilakukan dengan di wakili oleh Presiden Russia Dmitry Medvedev, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Presiden Nicolas Sarkozy sebagai representasi dari Uni Eropa didalam negoisasi ini. Walaupun di kritik oleh internasional, perang Georgia adalah jalan bagi Russia untuk menunjukkan sebagai kekuatan besar terhadap dunia. Meskipun demikian apa yang dilakukan oleh Russia membuat hubungannya dengan Swedia yang mengedepankan hak asasi manusia menjadi menurun dibanding pada tahun tahun sebelumnya. Menurut Riksdag bahwa apa yang dilakukan oleh Russia adalah ambisi politik semata untuk menguasai negara negara tetangganya.²²

Apa yang dilakukan oleh Moscow pada perang Chechnya dan Georgia menjadi perhatian utama bagi negara negara yang memegang prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, kritik banyak ditujukan terhadap Russia termasuk dari Swedia. Menurut Swedia, bahwa Russia masih kesulitan menyadari bahwa negara negara kecil mantan anggota Uni Soviet bukan lagi dikuasainya, dan menganggap bahwa Russia berhak melakukan apapun yang diinginkan terhadap negara negara tersebut, termasuk ketika negara negara kecil tersebut menginginkan untuk merapat terhadap Uni Eropa ataupun NATO, maka Russia berhak melakukan intervensi.

Melalui Riksdag, pentingnya melakukan hubungan antar negara dengan Russia terhadap kondisi apapun harus tetap dijalankan, meskipun apa yang dilakukan oleh Russia telah banyak melanggar prinsip kemanusiaan, Swedia menganggap bahwa Russia masih berusaha untuk bertransisi menjadi negara yang lebih demokratis dibanding sebelumnya, selain itu juga Swedia tetap akan melakukan kritik terhadap Russia bila masih melakukan pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia, tetapi juga akan tetap melanjutkan hubungan dan kerjasama dengan Russia,

²² K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 33

karena Russia termasuk negara tetangga penting bagi Swedia. Berbagai konflik yang melibatkan Russia, Uni Eropa masih belum bisa bersatu dalam cara menanganinya. Menurut Riksdag, cara Russia menangani konflik jauh dari kata konstruktif, karena hal ini membuat Swedia perlu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan Eropa dan Dunia. Maka dari itu Swedia meningkatkan dan mengeratkan hubungan dengan NATO, *Partnership of Peace* yang dibuat NATO untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan keamanan diantaranya dan negara negara di kawasan Eropa.²³

Pada 2008, Swedia memimpin *Nordic Battle Group* pertama kalinya, melalui grup tempur ini yang merupakan bagian dari Uni Eropa *battlegroups* yang terdiri dari Finlandia, Norwegia, Estonia, dan Irlandia sebagai contributor utama Carl Bildt menegaskan bahwa akan mengupayakan kerjasama lebih erat dengan NATO sebagai langkah tujuan untuk membawa bersama sama kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanannya. Pada 2009, Swedia memiliki kesempatan untuk mengirimkan delegasinya ke dalam parlemen Uni Eropa, dengan tujuan untuk membuat Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan dunia, Swedia juga menggunakan pengaruhnya untuk membuat Uni Eropa lebih bersatu dalam menghadapi ancaman dari manapun.²⁴

Hal ini ditegaskan kembali oleh Carl Bildt pada 2010, bahwa keanggotaan Swedia didalam Uni Eropa berarti bahwa Swedia termasuk dalam aliansi politik Uni Eropa, dengan demikian saling bekerjasama dan bersolidaritas antara masing masing anggota demi keamanan Eropa merupakan salah satu prinsip utama Swedia. Dan juga Swedia tidak akan tinggal diam jika anggota Uni Eropa ataupun negara negara nordik terkena bencana ataupun diserang oleh ancaman lain. Swedia juga mengharapkan negara negara lain juga berlaku sama bilamana Swedia mendapatkan kesulitan.²⁵

3. Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia 2010-2017

Pada awal 2011, terjadi banyak demonstrasi anti pemerintah yang menghasilkan protes besar dan pemberontakan diseluruh Timur Tengah, tidak terkecuali Suriah, dimana protes ini

²³ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 35

²⁴ TEPE, F. 2007, İSVEÇ NÖTRALİTESİ VE TERKİ, Swedish Neutrality and it's Abandonment, Vol.6, No. 2, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s, hal. 193.

²⁵ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 48

menghasilkan perang saudara, antara pendukung pemerintah, pemberontak serta pihak yang ingin mendirikan negara sendiri seperti *Islamic States*.

Russia memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme dalam perang sipil Suriah. Keterlibatannya dalam perang sipil ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kapabilitas militer mereka telah meningkat drastis dan bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan *interest* mereka.

Dalam konflik ini, Swedia melalui *Riksdag* menegaskan bahwa dalam kondisi perang sipil Suriah, permasalahan bukan hanya dalam pemerintahan Assad, tetapi juga karena faktor eksternal yaitu Russia dan China dimana kedua negara tersebut menggunakan hak veto untuk melindungi pemerintahan Assad terhadap intervensi PBB, maka dari itu Swedia harus melakukan aksi dan menerapkan penekanan terhadap kedua negara tersebut agar menyetujui adanya intervensi dari PBB. Swedia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Russia adalah melanggar hak asasi manusia dimana mendukung situasi konflik semakin memanjang.

Russia melakukan aneksasi terhadap krimea yang merupakan wilayah di Ukraina pada 18 Maret 2014, menurut pandangan dari masyarakat internasional bahwa apa yang dilakukan oleh Russia merupakan tindakan ilegal, tetapi menurut Russia, apa yang dilakukannya adalah sekedar hanya untuk melindungi etnis minoritas Russia dan mengambil alih apa yang seharusnya menjadi hak Russia. Pendudukan yang dilakukan oleh Russia terlihat sebagai tindakan yang benar.

4. Pertahanan Kolektif Internasional

Pengembangan dalam *Partnership of Peace* dimana Swedia telah menjadi anggota semenjak 1996, ketika terjadinya *Alliance's Wales 2014 Summit*, Swedia menandatangani *Status of Forces Agreement*, didalam kesepakatan ini yang dibuat atas inisiatif Amerika Serikat mengakibatkan Swedia dapat terus bekerjasama dengan NATO meliputi pertukaran intelejen dan partisipasi dalam latihan persiapan dan latihan kesiapan militer tempur. Pada 2015, Swedia ikut serta dalam beberapa latihan militer utama NATO seperti *Artic Challenge Exercise and Baltops*, dan juga dalam Trident Juncture 2015, latihan militer NATO terbesar semenjak 2002. Pada Wales Summit Swedia menandatangani juga Memorandum of Understanding untuk Host Nation Support Agreement. Yang berisi bahwa perjanjian ini akan berlaku sebagai basis rencana untuk operasi yang akan datang, meliputi latihan pada saat masa damai, manajemen krisis dan operasi militer saat keadaan perang di Swedia maupun di negara tetangganya. Swedia juga bekerjasama

dengan Norwegia, Denmark, dan Finlandia dalam NORDEFECO (NORdic DEFence COoperation). Pada 2013, angkatan bersenjata Swedia telah ikut serta lebih dari 130 proyek diberbagai area meliputi latihan, pertukaran informasi, dan pengembangan kapabilitas manajemen krisis.²⁶

5. Kekuatan Militer Swedia dari Tahun 1991-2017

Pedoman secara umum dari pertahanan Swedia ditentukan oleh parlemen Swedia (Riksdag), berdasarkan proposal dari pemerintah yang akan menentukan bagaimana pendanaan pertahanan nasional untuk pengembangan dari 10-15 tahun mendatang. Walaupun demikian pendanaan ini diadopsi setiap empat tahun sekali (1996-2000-2004-2009 dan 2015-2020), yang juga berdasarkan dari laporan dan penelitian lebih lanjut dari semua lembaga yang terlibat dalam konsep pertahanan total yang akan menentukan bagaimana kebijakan pertahanan Swedia akan diterapkan.

Anggaran pertahanan terbaru yang diterapkan Swedia adalah pada Juni 2015, yang disiapkan untuk menghadapi tekanan dan ancaman berdasarkan konflik Ukraina, yang merupakan negara tetangga Swedia. Kebijakan pertahanan Swedia berfokus pada Laut Baltik dan peningkatan kapabilitas pasukan militer untuk melancarkan serangan balik terhadap serangan dari negara asing dikawasan teritori Swedia. Inti dari anggaran pertahanan ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 7 milyar SEK (Sekitar 750 juta euro). Selain itu adanya tambahan 10.2 milyar SEK dalam jangka waktu 5 tahun.²⁷

6. Ancaman Russia terhadap Swedia

Kekuatan militer Russia memasuki abad ke 21 telah banyak berubah. Permasalahan besar dari kekuatan militer Russia dalam jangka panjang adalah minimnya latihan militer, sistem senjata yang tua, desertasi, kurangnya pendidikan dan kriminalitas yang tinggi. Militer Russia secara signifikan menurun dibanding ketika jaman Uni Soviet berkuasa, dimana personel militer pada saat itu berjumlah sekitar 2,7 juta personil militer. Sedangkan pada 2001, kekuatan militer Russia sekitar 1.365 juta personil militer. Ketika Vladimir Putin berkuasa pada pertama kali, Putin melakukan reformasi dalam hal kekuatan angkatan bersenjata Russia untuk

²⁶ Kunz, Barbara. (2015), *Sweden's NATO Workaround: Swedish defence policy against the backdrop of Russian revisionism*, Focus strategique no 64, 28

²⁷ Försvarpolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, prop. 2014/15:109, dalam <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020/>. Diakses pada 9 Agustus 2018

mengembangkan militer yang lebih profesional dan meningkatkan kemampuannya. Moskow secara serius melakukan prioritas tentang memodernisasi dengan meningkatkan bujet pertahanan, pada 2012, Vladimir Putin melakukan alokasi dana sekitar 23 triliun Ruble sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan militer Russia, atau sekitar kurang lebih 3 persen dari pengeluaran GDP dari 2012 sampai 2020. Hal ini merupakan modernisasi utama Russia semenjak akhir perang dingin.²⁸

Semenjak 2014, insiden kecil yang melibatkan militer Russia telah meningkat drastis. Pada 2014, pesawat NATO telah melakukan pencegatan terhadap pesawat Russia sebanyak lebih dari 100 kali, hal ini meningkat sekitar 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Finlandia, Norwegia dan Swedia tidak luput dari provokasi yang dilakukan oleh Russia. Pada 2016, Finlandia mengalami 5 penyusupan pesawat Russia, sedangkan Norwegia berhasil mencegah 74 pesawat tempur militer Russia, dikawasan perairan Norwegia.²⁹

Pengaruh Russia dalam keamanan lingkungan Swedia sangatlah nyata. Provokasi Russia terhadap kawasan territorial Swedia banyak terjadi, walaupun hal ini tidak hanya dilakukan terhadap Swedia tetapi terhadap negara-negara tetangga lain dari Russia dan juga negara-negara kawasan Baltik lain. Ancaman yang paling terlihat adalah pada maret 2013, dua pesawat bomber TU22M3 Backfire ditemani dengan empat jet tempur SU-27 Flanker fighter memasuki kawasan Swedia dan melakukan latihan tempur untuk menyerang dua target di selatan Swedia dan dekat dengan Stockholm. Tanpa adanya pilot yang siap serta pesawat yang mampu merespon cepat, Swedia hanya bisa mengamati insiden ini melewati layar radar mereka, meskipun demikian dua pesawat tempur F-16 Denmark diterbangkan dari Lithuania untuk merespon kejadian tersebut. Insiden tidak hanya berhenti di itu saja, pada Oktober 2014, kapal selam asing muncul di kawasan laut territorial Swedia, hal ini mengingatkan Swedia akan kejadian perburuan kapal selam Uni Soviet, U-137 di perairan Swedia pada tahun 1981. Indikator lain yang membuat lingkungan keamanan Swedia menurun drastis, termasuk pernyataan dari ilmuwan politik Russia yang menyarankan Swedia untuk menghapus ketegangan dengan menarik angkatan bersenjata dari pulau Gotland. Duta besar Viktor Tatarintsev mendeklarasikan dalam interview dengan

²⁸ Hayden, Rory J. (2017). *Russia's security relations with Finland, Norway, and Sweden*. Monterey: Calhoun. 79

²⁹ The New Russian Chill in the Baltic dalam , <http://www.currenthistory.com/Article.php?ID=1228> diakses pada 11 Agustus 2018

Dagens Nyheter pada juni 2015 mengatakan bahwa Russia tidak akan menjamin untuk tidak mempunyai rencana untuk menyerang Swedia dan juga mengatakan bahwa jika Swedia bergabung dengan NATO maka akan ada aksi balasan. Putin mengatakan bahwa akan ada konsekuensi bagi Swedia dalam kasus ini, dan juga untuk semua negara tetangga Russia yang akan bergabung dengan NATO.³⁰

7. Strategi Deterrence Swedia melalui Aliansi

Swedia merupakan suatu negara yang memiliki sejarah panjang mengenai kebijakan politik luar negeri yang menerapkan konsep netralitas semenjak 1814, dimana konflik militer terakhirnya adalah dengan Norwegia. Terletak dikawasan Eropa yang merupakan akar dari suatu peristiwa yang memicu konflik terbesar bagi sejarah manusia yaitu Perang Dunia pertama dan Perang Dunia kedua. Walaupun sebagian negara Eropa lain menerapkan kebijakan netalitas, tetapi tidak seberuntung Swedia yang selamat dari keterlibatan konflik semacam itu, katakanlah Belgia, Denmark, Luxemburg, dan Belanda yang akhirnya terpaksa terlibat dalam konflik Perang Dunia kedua setelah di invansi oleh Jerman.

Selepas Perang Dunia kedua, munculah Perang Dingin dimana terjadi perseteruan antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Swedia dalam hal ini masih menerapkan kebijakan luar negeri dengan netralitas dan ketidak berpihakan dalam konflik tersebut. Meskipun demikian, netralitas Swedia tidak dengan tidak melakukan apa apa. Tetapi melakukan berbagai cara dengan hal utama meningkatkan kapasitas militer dan persenjataan untuk menanggulangi bila Uni Soviet menyerang Swedia.

Paska runtuhnya Uni Soviet, berakhir juga Perang Dingin, hal ini membuat fokus strategi keamanan Swedia yang mulanya adalah penanggulangan ancaman invansi menjadi ke dalam fokus ancaman postmodernisme seperti ancaman terrorisme dan perubahan iklim.

8. Perubahan Doktrin dan Peningkatan Kekuatan Militer Swedia

Ketika Russia mulai melakukan berbagai provokasi terhadap negara negara tetangga maupun terhadap negara lain yang tidak sepaham dengan arah kebijakan politik luar negerinya. Swedia tidak luput dari provokasi yang dilakukan oleh Russia, mulai dari penyusupan kapal selam sampai dengan target latihan serangan nuklir membuat Swedia mulai memikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi ancaman dari Russia.

³⁰ Hayden, Rory J, *Op.cit*, hal.86

Dalam kasus ini Swedia mulai beralih dari fokus ancaman postmodernisme ke fokus strategi pertahanan nasional, dengan mulai meningkatkan anggaran militer, melakukan reformasi angkatan bersenjata, mengurangi pasukan ekspedisi dan mulai menerapkan kembali wajib militer bagi masyarakat Swedia. Rencana penambahan anggaran militer dalam jangka waktu 2016-2020 ini meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 7 miliar SEK (Sekitar 750 juta euro). Selain itu adanya tambahan 10.2 miliar SEK dalam jangka waktu 5 tahun. Sebelumnya pada tahun 2008-2016, fokus keamanan Swedia adalah mulai menerapkan konsep pertahanan *Deployable Defense*, yaitu adalah keputusan di menit terakhir dalam merespon terjadinya perang. Mulanya adalah dengan mematikan unit militer tertentu demi mengaktifkan pertahanan territorial kembali secara mendadak tanpa perubahan struktur organisasi militer yang ada. Dengan anggaran pertahanan ini, semua pasukan militer Swedia diharuskan untuk siap dalam melakukan operasi manajemen krisis dan pertahanan territorial Swedia sampai tahun 2019.

9. Melakukan Kerjasama Militer dan Aliansi

Meskipun demikian, dengan penerapan konsep pertahanan baru yang telah ditinggalkan semenjak perang dingin berakhir, dan peningkatan anggaran pertahanan secara drastis, memunculkan permasalahan baru bagi Swedia. Dengan banyaknya persenjataan militer yang ada, tetapi kurangnya personil tempur yang mampu mengoprasikannya, selain itu tidak strategisnya penempatan alat tempur bersenjata dan lamanya waktu mobilisasi bagi personil militer ketika perang membuat Swedia sadar bahwa dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu untuk menghadapi ancaman invasi dari Russia.

Karena hal tersebut, Swedia mulai melakukan berbagai pendekatan dengan aliansi militer NATO maupun mulai mengencarkan hubungan pertahanan militer dengan negara negara Nordic maupun Eropa Timur yang juga terancam oleh kebijakan politik luar negeri Russia, melalui aliansi maupun kerjasama pertahanan.

Walaupun Swedia belum bisa bergabung dengan NATO karena faktor minimnya masyarakat Swedia untuk bergabung dengan NATO dan tekanan dari Russia. Swedia tetap berhubungan erat dengan NATO melalui berbagai operasi militer bersama semenjak 1994 yaitu *Partnership of Peace* dan pada 2014 Swedia menandatangani *Memorandum of Understanding* untuk *Host Nation Support Agreement*. Yang berisi bahwa perjanjian ini akan berlaku sebagai basis rencana untuk operasi yang akan datang, meliputi latihan pada saat masa damai,

manajemen krisis dan operasi militer saat keadaan perang di Swedia maupun di negara tetangganya. Pada 2015, Swedia ikut serta dalam beberapa latihan militer utama NATO seperti *Artic Challenge Exercise and Baltops*, dan juga dalam *Trident Juncture 2015*, latihan militer NATO terbesar semenjak 2002. Swedia juga bekerjasama dengan Norwegia, Denmark, dan Finlandia dalam NORDEFECO (NORdic DEFence COoperation). Pada 2013, angkatan bersenjata Swedia telah ikut serta lebih dari 130 proyek diberbagai area meliputi latihan, pertukaran informasi, dan pengembangan kapabilitas manajemen krisis.

C. KESIMPULAN

Netralitas dan ketidakberpihakan tidak akan menyelamatkan suatu Negara akan ancaman asing dan Swedia mulai sadar akan hal tersebut. Swedia dengan kebijakan luar negeri yang mempunyai landasan netralitas dan ketidakberpihakan mulai merubah landasan politik luar negerinya dari akhir perang dingin hingga munculnya ancaman baru dari negara asing, yaitu Russia.

Meskipun demikian hubungan antara Swedia dengan Russia pada mula akhir perang dingin, sangatlah erat dengan fokus utama adalah membuat Russia menjadi negara yang lebih demokratis. Swedia mulai melakukan hubungan antar negara dengan Russia, dan terjalin erat ketika presiden Gorbachev berkuasa, Swedia terkejut ketika Russia menunjukkan keinginannya untuk bertransisi menjadi negara demokrasi. Swedia menyambut baik keinginan Russia ketika Russia melakukan reformasi politik dan ekonomi.

Hal ini berubah ketika Russia mulai meningkatkan anggaran pertahanan dan meningkatkan pula kekuatan militernya serta mulai melakukan ancaman dan bahkan invasi maupun aneksasi ke negara lain yang dasarnya tidak sepaham dengan kebijakan politik luar negeri Russia, seperti yang terjadi saat perang Chechnya, Georgia, dan Perang Sipil Ukraina.

Ancaman dari Russia atas Swedia mulai dari provokasi, latihan militer dengan target wilayah Swedia dan berbagai penyusupan yang dilakukan militer Russia, membuat Swedia mulai kembali kedalam kebijakan pertahanan nasional yang telah ditinggalkan semenjak akhir dari perang dingin.

Peningkatan anggaran pertahanan, kembali menerapkan wajib militer, pengurangan pasukan ekspedisi dan melakukan alokasi pasukan tersebut kedalam pasukan territorial membuat Swedia berharap untuk lebih siap dalam menghadapi ancaman negara lain

Meskipun demikian, dengan kekuatan sendiri Swedia tidak mampu melawan ancaman dari Russia, sehingga Swedia melakukan peningkatan hubungan pertahanan dengan negara lain maupun pakta pertahanan lain yaitu NATO dan negara nordik lain. Hal ini dilakukan karena adanya ancaman bersama yaitu Russia.

Dengan melakukan peningkatan hubungan pertahanan melalui pertukaran intelejen, latihan militer bersama, serta penempatan pasukan koalisi di wilayah strtategis diharapkan mampu meningkatkan daya gentar Swedia, menghadapi ancaman yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Basset, B. (2012), *Factors Influencing Sweden's Changing Stance on Neutrality*, Urbana: University of Illinois, 36

Försvarpolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, prop. 2014/15:109, dalam <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020/>. Diakses pada 9 Agustus 2018

Gustafsson. *The Swedish Submarine Issue*. (Stockholm: The Royal Swedish Academy of War Science, 2010) hal.5

Hayden, Rory J. (2017). *Russia's security relations with Finland Norway, and Sweden*. Monterey:Calhoun. 79

ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) dalam https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm diakses pada 08 Agustus 2018

K. Lidqvist (2016) *Cool Neighbours: How has Sweden's attitude towards Russia changed since the end of the Cold War*. Trollhattan:University of West, 22.

Kunz, Barbara. (2015), *Sweden's NATO Workaround: Swedish defence policy against the backdrop of Russian revisionism*, Focus strategique no 64, 28

Lundgren, Joel (2013) *The Nordics' fear of the Russian Bear*, Gothenburg: University of Gothenburg, hal. 1

NATO report: A 2013 Russian aerial exercise was actually a 'simulated nuclear attack' on Sweden. dalam businessinsider: <http://www.businessinsider.sg/nato-report-russia-sweden-nuclear-2016-2/?r=US&IR=T>, diakses pada 3 Maret 2018

Parker, Joshua. (2017) *The Neutral Ally: Sweden and the Social Construction of Security Identity*, Ottawa: University of Ottawa, 44

Russia's Provocations in the Nordic-Baltic States: The U.S. Needs a Strategy to Support the Region. Dalam Heritage.org: <https://www.heritage.org/europe/report/russias-provocations-the-nordic-baltic-states-the-us-needs-strategy-support-the>, diakses pada 24 April 2018

Russian jets practised attacks on Sweden.dalamThe local:
<https://www.thelocal.se/20130422/47474>, diakses pada 3 Maret 2018

Sweden: The Defense that Disappeared Dalam gatestoneinstitute.org:
<https://www.gatestoneinstitute.org/6287/sweden-military> diakses pada 10 mei 2018